

Iklan

KESETARAAN

Solidaritas Artifisial dalam Negara Kesejahteraan

Wujud negara kesejahteraan yang dibutuhkan Indonesia harus lebih dari sekadar menyelesaikan masalah komodifikasi atas hak kesejahteraan, dan juga mengintegrasikan sebanyak mungkin individu ke dalam ekonomi pasar.

Audio Berita 12 menit

Oleh **TAUCHID KOMARA YUDA**
16 April 2023 11:00 WIB - 6 menit baca

A TEKS



Artikel Todung Mulya Lubis, "[Negara Kesejahteraan dan Politik Solidaritas](#)" (*Kompas*, 3/4/2023), mengingatkan kita pentingnya egalitarianisme, ajaran tentang kesetaraan yang konon telah menjaga bangunan institusi negara kesejahteraan tetap kokoh.

Poin penting untuk disorot dari tulisan Lubis adalah keberhasilan pemerintah di negara-negara kesejahteraan mengemas [egalitarianisme](#) dalam wujud pajak progresif dan transparansi yang memungkinkan publik dapat mengakses rekam jejak perolehan kekayaan siapa pun. Alhasil, perbedaan status sosial ekonomi antara warga menjadi tidak terlalu mencolok.

Nilai egalitarianisme juga disebut-sebut telah membentuk *attitude* "rasa malu" untuk seseorang mempertontonkan kekayaannya. Ini dapat dipahami karena "pajak yang sangat tinggi membuat penumpukan kekayaan tak segampang di negara yang tidak punya transparansi dan akuntabilitas" (Lubis, 3/4). Ini otomatis juga mencegah seseorang dari tindakan *flexing* yang belakangan meresahkan di jagat maya.

Pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat sistem dan nilai egalitarianisme semacam itu dapat berkembang dalam masyarakat Eropa; dan mengapa nilai egalitarianisme tidak mewujud dalam *daily politics* masyarakat Indonesia?

Baca Juga: [Kebijakan Fiskal Progresif](#)

Risiko sosial dan industrialisasi

Sebelum mempersepsikan wujud ideal negara kesejahteraan Eropa sebagai entitas yang perlu dikejar dalam kebijakan nasional, ada baiknya kita memahami bagaimana masyarakat Eropa mengimajinasikan solidaritasnya.

Arts & Gelissen (2001) menggambarkan solidaritas masyarakat Eropa sebagai *institutionalized solidarity* (solidaritas yang dilembagakan). Definisinya tidak jauh beda dengan [solidaritas buatan](#) (*artificial solidarity*). Intinya, ini semacam solidaritas yang diupayakan untuk menggantikan disfungsinya [sistem kekerabatan](#) melalui sebuah bangunan institutional bernama negara kesejahteraan.

Cikal bakal disfungsi sistem kekerabatan ini dapat ditelusuri bersamaan dengan revolusi industri dua abad lalu. Sebelum industrialisasi berlangsung, sistem produksi masih diatur dalam lingkup komunal terbatas untuk sekadar bertahan hidup para anggotanya. Cara kerjanya pun diatur secara kolektif, dengan jam kerja yang fleksibel dan berorientasi pada kemakmuran komunitas.

Karakter [sistem perlindungan sosial](#) yang berkembang juga tidak jauh beda. Dibangun dengan prinsip timbal balik antaranggota masyarakat (resiprositas), dengan fungsi untuk mengelola risiko sosial. Dalam literatur kebijakan sosial (*social policy*) sistem perlindungan sosial semacam ini disebut *welfare society*.

Sayangnya, sistem *welfare society* tidak dapat bertahan ketika industrialisasi masuk. Itu adalah masa ketika tujuan orang memproduksi barang diubah, dari yang awalnya dikerjakan secara berkelompok, memenuhi kebutuhan komunalitasnya perlahan diarahkan untuk menyangga sistem ekonomi pasar.

Implikasinya serius, kesejahteraan manusia pada akhirnya dipersepsikan seolah tidak jauh beda dengan komoditas, yang hanya mungkin didapat melalui hubungan kerja. Di sinilah titik persoalannya ketika kesejahteraan hanya didapat di dalam pasar kerja. Mereka-mereka yang jadi *outsider* berpotensi dikecualikan dari hak atas kesejahteraan (*right to welfare*).

Kesejahteraan manusia pada akhirnya
dipersepsikan seolah tidak jauh beda
dengan komoditas, yang hanya mungkin
didapat melalui hubungan kerja.

Menariknya, pada masa ketika kesejahteraan sudah sepenuhnya terkomodifikasi, manusia justru disibukkan dengan kemenonjolan diri, tetapi secara bersamaan juga dengan keselamatan mereka masing-masing. Hal ini terutama karena industrialisasi diam-diam telah mendorong "mutasi" jenis risiko sosial yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya.

Ilustrasi terbaik dapat ditemukan dalam sektor kesehatan. Dahulu, banyak penyakit yang biaya pengobatannya tidak sampai harus menjual harta benda. Namun, kini jenis penyakit yang diderita manusia menjadi kian beragam. Memang tidak menular, tetapi biaya pengobatannya menjadi sangat mahal. Misalnya, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes, yang kini umum diidap masyarakat. Menurut literatur, transisi risiko penyakit ini disebabkan kebutuhan efisiensi menuntut adanya pemadatan aktivitas ruang gerak manusia

Sementara semua risiko itu dipersonalisasi, [solidaritas sosial](#) yang sebelumnya dapat menjadi jaring pengaman sosial yang lebih dari mampu menanggung sebagian biaya pengobatan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks pensiun pun demikian. Hari tua bagi sebagian orang mulai dipandang sebagai sesuatu yang penuh dengan ketakutan karena pranata-pranata sosial yang sebelumnya dapat memberikan penghidupan bagi warga lansia mulai merenggang.

Baca Juga: [Tantangan Memperkuat Kesejahteraan Sosial](#)

Lambat laun, akumulasi kompleksitas-kompleksitas ini dirasakan semakin berat. Ini akhirnya mengarahkan kepada permintaan dan dukungan kolektif untuk pendirian negara kesejahteraan. Ini merupakan sebuah sistem ketika setiap warga negara dapat lebih "tergantung" kepada negara dalam mengelola urusan kesejahteraan mereka.

Bahkan, dengan ketentuan yang memaksa mereka untuk membayar pajak sangat tinggi, mereka tidak akan protes. Karena hanya dengan cara itulah mereka tidak lagi khawatir dengan mahalnnya biaya kesehatan ketika jatuh sakit, memasuki usia pensiun, termasuk jika harus menganggur. Yang terpenting, ini berlaku universal dan dengan desain kebijakan yang egaliter.

Jadi, bayangan soal [politik solidaritas](#) masyarakat Eropa yang seolah menjunjung egalitarian harus "sedikit" direvisi. Karena yang sesungguhnya yang diimajinasikan orang-orang Eropa tentang solidaritas sosial tidak lebih dari politik terhindar dari kerentanan (*politics against insecurity*).



Realitas Eropa saat ini

Negara kesejahteraan hari ini mungkin merupakan sempalan besar yang tersisa dari reformasi pasar di akhir 1980-an. Diadopsinya Active Labor Market Policy (inisiasi yang menekankan kepada syarat-syarat tertentu yang dikenakan penganggur untuk dapat menerima bantuan sosial) sebagai alternatif atas Passive Labor Market Policy (tunjangan pengangguran tanpa syarat), yang sebelumnya menjadi kebanggaan negara kesejahteraan pasca-Perang Dunia II telah menandai perubahan politik solidaritas di Eropa kontemporer.

Gingrich & Häusermann (2015) menunjukkan bahwa suara kelas pekerja dalam institusi-institusi negara kesejahteraan menurun dan gagasan "perjuangan kelas" juga tampak kurang terlihat dalam kehidupan politik negara kesejahteraan. Deeming (2015) lebih jauh menunjukkan bahwa semakin banyak ditemukan kelompok kelas pekerja yang malu-malu menawarkan dukungan untuk kebijakan sosial universal dan manfaat pengangguran.

Catatan-catatan historis hampir semua sepakat bahwa orang-orang yang hidup pada masa awal berakhirnya Perang Dunia II bergandeng tangan untuk mendukung ide negara kesejahteraan.

Ini juga mungkin disebabkan karakteristik kelas pekerja yang hari ini terbagi ke dalam beberapa lapisan pendapatan ekonomi. Ini artinya tingkat resiliensinya terhadap guncangan akan berbeda-beda. Pun dukungan terhadap negara kesejahteraan juga akhirnya mengambil bentuknya yang sangat beragam.

Kenyataan ini berbalik dengan situasi pasca-Perang Dunia II. Dalam keadaan saat ekonomi berada di level paling bawah, tidak ada pilihan lain selain mendukung ide negara kesejahteraan yang memang hampir semua orang butuhkan untuk menyambung hidup.

Dari sini kita menjadi paham bahwa politik solidaritas hanya mungkin berada pada level paripurna ketika masyarakat dihadapkan pada situasi kerentanan.



Konteks Indonesia

Tidak begitu sulit memahami mengapa nilai egalitarianisme sulit tumbuh dalam *daily politics* masyarakat Indonesia. Alasan pertama karena faktor kesejarahan. Tumbuhnya egalitarianisme di Eropa, selain karena faktor industrialisasi, juga dibentuk dalam semangat untuk mengoreksi pemerintahan monarki yang saat itu syarat dengan korupsi, panen utang, diliputi kebijakan upeti dan pajak yang menyengsarakan rakyat.

Dalam konteks Indonesia (dan juga sebagian besar masyarakat Asia Tenggara), negara bangsa merupakan manifestasi politik yang basisnya ada pada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Bukan mengisolasi sistem nilai dan kebudayaan monarki yang faktanya sebagian tetap terserap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita.

Jawaban selanjutnya adalah industrialisasi yang tidak seragam dan distribusi risiko sosial yang tidak merata membuat politik solidaritas untuk negara kesejahteraan tersegmentasi di kalangan tertentu. Pada orang-orang yang berada dekat dengan wilayah perkembangan masyarakat industri, kemungkinan mereka mendukung ide-ide negara kesejahteraan bisa lebih besar. Namun, ada sebagian lain yang bersikap sebaliknya, bahkan cenderung destruktif, semisal menunggak atau hanya mengiur BPJS Kesehatan "hanya" ketika sakit.

Realitas di Indonesia mengatakan bahwa keluarga, kerabat, dan lembaga komunitas masih lebih sigap dari negara ketika individu jatuh sakit, pensiun, dan bahkan dalam keadaan menganggur sekalipun.

Ini menarik. Pertanyaannya, apakah masyarakat tidak mengerti perbuatannya itu keliru atau memang ini soal siapa yang benar-benar dipercaya untuk menjadi jaring pengaman sosialnya di masa sulit?

Realitas di Indonesia mengatakan bahwa keluarga, kerabat, dan lembaga komunitas masih lebih sigap dari negara ketika individu jatuh sakit, pensiun, dan bahkan dalam keadaan menganggur sekalipun. Dengan demikian, sering kita temukan prioritas untuk mengeluarkan uang sering kali menasar kepada kegiatan berderma sebagai yang utama. Bahkan, dengan nominal yang mungkin bisa jauh di atas premi iuran BPJS Kesehatan dan dengan frekuensi transfer yang mungkin saja bisa lebih dari satu kali dalam sebulan.

Penulis tidak ingin mengatakan bahwa institusi informal adalah kendala bagi tumbuhnya ide negara-negara kesejahteraan. Akan tetapi, menyatukan dan membingkai ulang sistem yang ada agar sesuai dengan sistem sosial yang berlaku adalah cara untuk mengompromikan gagasan negara kesejahteraan dengan kenyataan.

Ini sekaligus menegaskan ulang argumen penulis pada tulisan "[Negara Kesejahteraan, atau Masyarakat yang Sejahtera?](#)" (28/1), yang juga merespons artikel Lubis, "[Negara Kesejahteraan](#)", diawal tahun (9/1). Pada salah satu bagian dari tulisan, penulis berargumen segala bentuk inkonsistensi dalam praktik negara kesejahteraan mungkin merupakan bagian dari proses pencarian ide negara kesejahteraan yang lebih kontekstual.

Baca Juga: [Komitmen Negara Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia](#)

Pertanyaannya, seperti apa negara kesejahteraan yang kontekstual itu? Jawabannya perlu dicari melalui survei yang menanyakan tentang apa yang masyarakat bayangkan tentang kesejahteraan dan hidup bahagia.

Di luar itu semua, advokasi negara kesejahteraan adalah agenda yang membutuhkan lebih banyak perenungan. Ini bukan tugas mudah. Namun, penulis percaya bahwa wujud negara kesejahteraan yang dibutuhkan Indonesia harus lebih dari sekadar menyelesaikan masalah komodifikasi atas hak kesejahteraan (*politics against markets*), tetapi juga mengintegrasikan sebanyak mungkin individu ke dalam peluang ekonomi pasar (*politics for markets*).

[Tauchid Komara Yuda](#), Dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, [UGM](#); Mahasiswa Doktoral di [Lingnan University](#), Hong Kong



Tauchid Komara Yuda

DOK. PRIBADI